

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Syamsul Arifin. (2015). Psikologi Sosial. Bandung: CV Pustaka Setia
- Grindle Merilee S., *Politics And Apolicy Implementations In The Third Word*, New Jersey, Price Town University Press.
- Hadis, Liza., & Eddyono, Sri. (2005). Pengakuan Peran Gender dalam Kebijakan-Kebijakan di Indonesia. Jakarta : LBH APIK.
- Kansil, C.S.T, 2008, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta.
- Luky Sandra Amalia, 2021, Dinamika Sosial Politik Pemilu Serentak 2019, LIPI Press, anggota Ikapi, Maret.
- McClosky. (1972). Political Participation; International Encyclopedia of the Social Sciences. New York : The Macmillan Company.
- Muhtar Haboddin, 2016, Pemilu dan Partai Politik di Indonesia, UB Press, Malang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rambe Kamarul Zaman, Perjalanan Panjang Pilkada Serentak, Expose PT Mizan Publika, Jakarta, 2016.
- Saleh, 2017, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sirajuddin dan Winardi, 2015, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang.
- Suci, Mar'ih Koesomowidjojo. 2017. Analisis Beban Kerja, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Suratman dan Philipis Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta,CV, Bandung.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Konvensi Internasional Tentang “Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan” (*Convension on The Elimination of All Discrimination Against Woman*) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan peserta pemilu Anggota DPR, DPRD

INTERNET

https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dprd

<https://www.bbc.com/indonesia/podcasts/p0btnmzx>

<https://www.antaraneews.com/berita/3197997/mendorong-partisipasi-dan-keterwakilan-perempuan-jember-di-pemilu-2024>

<https://beritajatim.com/11-caleg-perempuan-tembus-dprd-jember-terbanyak-sepanjang-era-reformasi>

<https://www.kissfmjember.com/2023/10/08/aturan-kuota-perempuan-30-persen-bacaleg-dari-10-parpol-di-jember-berpotensi-dicoret.html>

<https://www.liputan6.com/pemilu/read/5444079/tetapkan-dct-anggota-dpr-kpu-pastikan-keterwakilan-perempuan-di-atas-30-persen>

<https://www.kompasiana.com/dindamutiq/60dc52c71525102bdc2b2612/partai-politik-dan-isu-kuota-30-perempuan-dalam-keterwakilan-politik>

<https://beritajatim.com/11-caleg-perempuan-tembus-dprd-jember-terbanyak-sepanjang-era-reformasi>